

PENGADILAN AGAMA NEGARA (402571)

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir 30 September Tahun 2023

Jl.Negara Kandangan Km. 3,5 No.56

Hulu Sungai Selatan - Kalimantan Selatan 71254

Telp. 051751421 Fax. 051751421

e-mail : pa.negara@gmail.com



LAPORAN KEUANGAN

PENGADILAN AGAMA NEGARA (402571)

Untuk Periode yang Berakhir 30 September 2023

BAGIAN ANGGARAN 005.01

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jl.Negara Kandangan Km. 3,5 No.56

Telp. 051751421 Fax. 051751421

Hulu Sungai Selatan - Kalimantan Selatan 71254

e-mail : pa.negara@gmail.com

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Agama Negara adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Negara mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Agama Negara. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Hulu Sungai Selatan, 2 Oktober 2023

Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,



Akhmad Muzakki, S.H.I.
NIP. 198011172007041001

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan.....	10
I. Laporan Realisasi Anggaran	14
II. Neraca.....	16
III. Laporan Operasional.....	19
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	22
V. Catatan atas Laporan Keuangan	24
A. Penjelasan Umum	24
A.1. Dasar Hukum.....	24
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Negara.....	25
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	27
A.4. Basis Akuntansi	28
A.5. Dasar Pengukuran	28
A.6. Kebijakan Akuntansi.....	28
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran	36
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah	36
B.2. Belanja	37
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca.....	41
C.1. Aset Lancar.....	41
C.2. Aset Tetap	43
C.3. Aset Lainnya	47
C.5. Kewajiban Jangka Pendek	48
C.6. Ekuitas.....	50

D.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	50
D.1.	Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak	50
D.2.	Beban Pegawai	50
D.3.	Beban Persediaan.....	51
D.4.	Beban Barang dan Jasa.....	52
D.5.	Beban Pemeliharaan	53
D.6.	Beban Perjalanan Dinas.....	54
D.7.	Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	54
D.8.	Beban Bantuan Sosial.....	55
D.9.	Beban Penyusutan dan Amortisasi.....	55
D.10.	Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih	56
D.11.	Beban Lain-lain.....	57
D.12.	Kegiatan Non Operasional.....	57
D.13.	Pos Luar Biasa.....	58
E.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	58
E.1.	Ekuitas Awal	58
E.2.	Surplus (defisit) LO	59
E.3.	1. Penyesuaian Nilai Aset	59
E.3. 2	Koreksi Nilai Persediaan	59
E.3. 3	Selisih Revaluasi Aset Tetap	59
E.3. 4	Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	60
E.3. 5	Koreksi Lain-lain	60
E.4.	Transaksi Antar Entitas.....	60
E.4. 1	Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL).....	61
E.4. 2	Transfer Masuk/Transfer Keluar	61
E.3.	Ekuitas Akhir	61
F.	Pengungkapan Penting Lainnya	62
F.1.	Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca	62
F.2.	Pengungkapan Lain-lain	62

Daftar dan Lampiran	64
Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap	65
Daftar Hibah Langsung.....	67
Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrua.....	69

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Pengadilan Agama Negara

Jl.Negara Kandangan Km. 3,5 No.56 Hulu Sungai Selatan - Kalimantan Selatan 71254

Telp. 051751421 Fax. 051751421 e-mail : pa.negara@gmail.com

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Negara yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 30 September Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Negara telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Hulu Sungai Selatan, 2 Oktober 2023

Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris

The image shows a circular official stamp of the Pengadilan Agama Negara (State Religious Court) in purple ink. The stamp contains the text 'PENGADILAN AGAMA NEGARA' around the perimeter and a central emblem. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Akhmad Muzakki, S.H.I.

NIP. 198011172007041001

RINGKASAN

Ringkasan

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Negara Semester I Tahun 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Triwulan III TA 2023 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari 2023 s.d. 30 September 2023.

Realisasi Pendapatan Negara pada Triwulan III TA 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp0,- atau mencapai 0 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp618.000,-

Realisasi Belanja Negara pada Triwulan III TA 2023 adalah sebesar Rp1.950.583908,- atau mencapai 68,55 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp2.845.580.000,-

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 30 September 2023 dan 2022.

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Nilai Aset per 30 September 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp3.424.330.068,-, yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp24.000.000; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp3.400.330.068,-; Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp0; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp0.

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp159.815.542,-; yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp159.815.542; dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp0.

Nilai Ekuitas Dana disajikan sebesar Rp3.264.514.526,-.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus(defisit) dari operasi, surplus(defisit) dari kegiatan nonoperasional, surplus (defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus(defisit) -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 September 2023 adalah sebesar Rp0,-, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp2.207.205.074,-, sehingga terdapat surplus(defisit) dari Kegiatan Operasional senilai minus Rp(2.207.205.074),-, Kegiatan Non Operasional Lainnya dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus(deficit) sebesar minus Rp0,-, dan surplus(defisit) sebesar minus Rp0,-, sehingga entitas mengalami surplus(defisit) -LO sebesar minus Rp(2.207.205.074),-.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2023 adalah sebesar Rp3.492.829.442,- dikurangi surplus(defisit)-LO sebesar Rp(2.207.205.074), kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp0,-, dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp1.978.890.158,-, sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 September 2023 adalah senilai Rp3.264.514.526,-.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan

oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 September 2023, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 September 2023 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Dalam penyajian Neraca untuk periode per 30 September 2023, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

I. LRA PERBANDINGAN

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN AGAMA NEGARA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2023 DAN 2022
(dalam satuan Rupiah)

	Uraian	Catatan	TA 2023			TA 2022
			Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
A.	Pendapatan Negara dan Hibah	B.1				
1	Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	618.000	-	0,00	4.213.400
	Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah		618.000	-	0,00	4.213.400
B.	Belanja Negara	B.2				
1	Belanja Pegawai	B.2.1	2.048.767.000	1.429.049.568	69,76	1.572.289.565
2	Belanja Barang	B.2.2	796.813.000	521.534.340	65,45	621.212.750
3	Belanja Modal	B.2.3	-	-	0,00	10.000.000
	Jumlah Belanja Negara		2.845.580.000	1.950.583.908	68,55	2.203.502.315

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

II. NERACA PERBANDINGAN

II. Neraca

PENGADILAN AGAMA NEGARA NERACA PER 30 SEPTEMBER 2023 DAN 2022 (dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	TA 2023	TA 2022
ASET			
Aset Lancar	C.1		
Kas dan Bank			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1. 1.	24.000.000	0
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.1. 2.	0	0
Persediaan	C.1. 3.	0	0
Jumlah Aset Lancar		24.000.000	0
Aset Tetap	C.2		
Tanah	C.2. 1.	1.604.226.000	1.604.226.000
Peralatan dan Mesin	C.2. 2.	2.615.348.076	2.508.280.576
Gedung dan Bangunan	C.2. 3.	1.444.657.000	1.444.657.000
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.2. 4.	0	74.717.500
Aset Tetap Lainnya	C.2. 5.	30.871.557	30.871.557
Konstruksi dalam Pengerjaan	C.2. 6.	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2. 7.	(2.294.772.565)	(2.169.923.191)
Jumlah Aset Tetap		3.424.330.068	3.492.829.442
Aset Lainnya	C.4		
Aset tak Berwujud	C.4. 1.	14.450.000	14.450.000
Aset Lain-Lain	C.4. 2.	0	0
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.4. 3.	(14.450.000)	(14.450.000)
Jumlah Aset Lainnya		0	0
Jumlah Aset		3.424.330.068	3.492.829.442
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek	C.5		

Utang kepada Pihak Ketiga	C.5. 1.	131.815.542	0
Uang Muka dari KPPN	C.5. 2.	24.000.000	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		159.815.542	0
Jumlah Kewajiban		159.815.542	0
EKUITAS			
Ekuitas Dana Lancar	C.6		
Jumlah Ekuitas Dana		3.264.514.526	3.492.829.442
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana		3.424.330.068	3.492.829.442

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

III. LAPORAN OPERASIONAL

III. Laporan Operasional

PENGADILAN AGAMA NEGARA
LAPORAN OPERASIONAL
PER 30 SEPTEMBER 2023 DAN 2022
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	TA 2023	TA 2022
Kegiatan Operasional			
Pendapatan			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	0	0
Jumlah Pendapatan		0	0
Beban			
Beban Pegawai	D. 2	1.551.569.110	1.705.736.328
Beban Persediaan	D. 3	22.429.000	28.889.000
Beban Barang dan Jasa	D. 4	347.184.938	380.363.868
Beban Pemeliharaan	D. 5	129.623.501	172.166.078
Beban Perjalanan Dinas	D. 6	35.592.901	48.584.548
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D. 7	0	0
Beban Bantuan Sosial	D. 8	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D. 9	120.805.624	77.267.595
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D. 10	0	0
Beban Lain-lain	D. 11	0	0
Jumlah Beban		2.207.205.074	2.413.007.417
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(2.207.205.074)	(2.413.007.417)
Kegiatan Non Operasional			
Surplus Pelepasan Aset Non Lancar	D. 12	0	(4.213.400)
Surplus Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0	0
Surplus Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
Pendapatan dari Keg. Non Operasional lainnya		0	0

Beban dari Keg. Non Operasional lainnya	0	0
Jumlah surplus defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0
Surplus Defisit dari Kegiatan Non Operasional	0	(4.213.400)
Pos Luar Biasa	D. 13	
Beban Luar Biasa	0	0
Beban Perjalanan Dinas	0	0
Beban Persediaan	0	0
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	(2.207.205.074)	(2.408.794.017)

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN AGAMA NEGARA LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS PER 30 SEPTEMBER 2023 DAN 2022

(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	TA 2023	TA 2022
Ekuitas Awal	E. 1	3.492.829.442	3.144.118.347
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	E. 2	(2.207.205.074)	(2.408.794.017)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi / Kesalahan Mendasar			
Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas		0	0
Penyesuaian Nilai Aset	E. 3	0	0
Koreksi Nilai Persediaan	E. 4	0	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E. 5	0	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E. 6	0	0
Koreksi Lain-lain	E. 7	0	0
Jumlah Lain-lain		0	0
Transaksi Antar Entitas	E. 8	1.978.890.158	2.404.793.665
Ekuitas Akhir		3.264.514.526	3.140.117.995

*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
- e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual pada Laporan Keuangan;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua dan PP Nomor 45 Tahun 2013 mengenai Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- i. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan

Akun Standar;

- j. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;
- k. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
- l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat
- n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
- o. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015.

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Negara

1. Visi

“Terwujudnya Peradilan Agama Negara Yang Agung”.

2. MISI

Misi Pengadilan Agama Negara adalah :

- 1. Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;
- 2. Meningkatkan Akses Peradilan Bagi masyarakat Miskin dan Terpinggirkan;
- 3. Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan;

4. Meningkatkan Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Agama Negara melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya percepatan proses penerimaan administrasi perkara dan penyelesaiannya sesuai dengan SOP sejak perkara didaftar sampai perkara diselesaikan, dengan sasaran terdافتarnya perkara gugatan/ permohonan secara tertib dan cepat pada Pengadilan Tingkat Pertama, terwujudnya persidangan perkara secara sederhana pada tingkat pertama dan terbitnya putusan/ penetapan yang cepat, tepat dan memenuhi rasa keadilan serta dapat dilaksanakan (eksekutabel) pada tingkat pertama. Dengan program peningkatan dukungan manajemen peradilan agama dengan kegiatan peningkatan mutu pelayanan dalam hal penerimaan perkara, peningkatan mutu pelayanan dalam persidangan dan peningkatan mutu pelayanan dalam mengadili/memutus perkara.
2. Meningkatnya jumlah pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan, dengan sasaran terwujudnya peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) baik pada pengadilan tingkat pertama. Dengan program peningkatan dukungan manajemen peradilan agama dengan kegiatan pelaksanaan perkara prodeo dan sidang keiling dibiayai oleh negara pada pengadilan tingkat pertama.
3. Meningkatnya efektifitas pembinaan dan pengawasan, dengan sasaran Terwujudnya peningkatan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap jalannya peradilan pada pengadilan tingkat pertama serta terwujudnya peningkatan pelaksanaan pembinaan pengawasan terhadap aparatur pengadilan pada pengadilan tingkat pertama. Dengan program peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur Hakim Pengawas Bidang (Hawasbid) pada pengadilan tingkat pertama, peningkatan pengawasan dan akuntabilitas terhadap aparatur, dengan kegiatan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan internal Hawasbid Tingkat pertama secara berkala, menindaklanjuti setiap hasil temuan dan melaporkannya kepada Ketua Pengadilan Agama kemudian diteruskan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama, pelaksanaan Pembinaan

dan Pengawasan internal, pengawasan daerah secara berkala serta pengawasan insidental serta menindaklanjuti setiap hasil temuan dan melaporkannya kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama.

4. Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi peradilan dengan meningkatkan pelayanan publik yang transparan dalam penyelenggaraan peradilan pada Pengadilan Agama, dengan sasaran terwujudnya peningkatan pelayanan publik yang transparan dalam penyelenggaraan pengadilan tingkat pertama, terwujudnya peningkatan kemudahan akses bagi masyarakat pencari keadilan dan terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan pengaduan bagi masyarakat. Dengan program peningkatan mutu pelayanan berperkara dengan biaya ringan/ terjangkau, peningkatan mutu pelayanan penyerahan salinan putusan/ penetapan dan akte cerai kepada para pihak dan peningkatan mutu pelayanan penyerahan salinan putusan/ penetapan kepada Pengadilan Agama pengaju kemudian diserahkan kepada para pihak serta peningkatan pelayanan pengaduan dengan cepat, akurat dan akuntabel. Dengan kegiatan menerbitkan SK. Panjar biaya perkara sesuai radius di tingkat pertama, menempelkan SK Panjar biaya perkara pada pengadilan tingkat pertama dan SK. Biaya proses pada pengadilan tingkat pertama di papan informasi agar mudah terbaca, menayangkan SK Panjar biaya perkara, SK Biaya Proses Berperkara dan pengelolaan biaya perkara di website, optimalisasi penggunaan aplikasi SIADPA Plus dan SIADPA juga aplikasi SIIP terbaru, menerbitkan SK. Biaya Proses perkara pertama dan menindaklanjuti seluruh pengaduan dan menayangkan hasil tindak lanjut kedalam website.

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran,

Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4. Basis Akuntansi

Kantor menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Agama Negara adalah sebagai berikut:

(1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2.) Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3.) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh

pemerintah.

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4.) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5.) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak

dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

- b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada

Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan

- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar

harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.

- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software Komputer</i>	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6.) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - (1.) Kewajiban Jangka Pendek
 - (2.) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas

bulan setelah tanggal pelaporan.

(3.) Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

(4.) Kewajiban Jangka Panjang

(5.) Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7.) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi
Pendapat
an
Negara
dan Hibah
: Rp0,-

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 adalah sebesar Rp.0,- atau mencapai 0 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 618.000,- Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Agama Negara adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 30 September 2023				
(dalam satuan Rupiah)				
No	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan	618.000	-	-
2	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan	-	-	-
Total Pendapatan		618.000	0	0,00

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah mengalami penurunan sebesar Rp. 4.213.400 atau sebesar 100 persen dari realisasi tahun lalu pada periode yang sama. Kenaikan tersebut disebabkan karena adanya pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin;

Perbandingan realisasi PNBP TA 2023 dan 2022 disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 1 Perbandingan Realisasi PNBP per 30 September TA 2023 dan 2022
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2023	2022	Perubahan	
				Rp	%
1.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	0	0	0
2.	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	4.213.400	(4.213.400)	(100)
Total Pendapatan		0	4.213.400	(4.213.400)	(100)

B.2. Belanja

Realisasi
Belanja
Negara :
Rp
1.950.583
.908,-

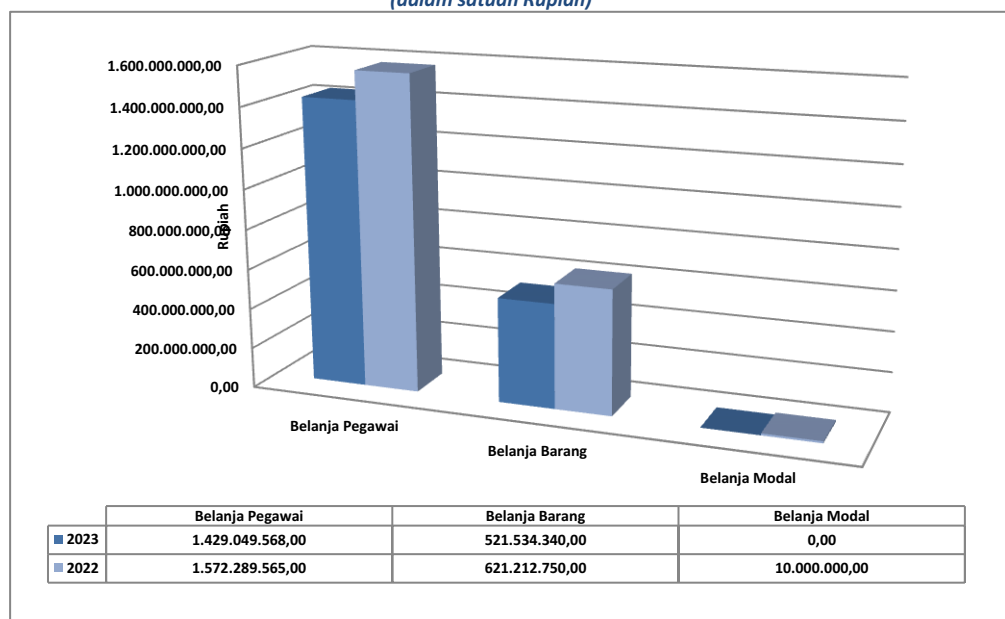
Realisasi Belanja Negara Pengadilan Agama Negara per 30 September TA 2023 adalah sebesar Rp. 1.950.583.908,- setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar 68,55% dari anggaran senilai Rp. 2.845.580.000,- Rincian anggaran dan realisasi belanja pada Semester I TA 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 September TA 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 September TA 2023		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	2,048.767.000	1.429.234.780	69,76
Belanja Barang	796.813.000	521.534.340	65,45
Belanja Modal	0	0	0
Total Belanja Bruto	2.845.580.000	1.950.769.120	68,55
Pengembalian Belanja		185.212	0
Total Belanja Netto	2.845.580.000	1.950.583.908	68,55

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 September TA 2023
(dalam satuan Rupiah)



Sumber: Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA) 2023 & 2022

Realisasi Belanja Negara mengalami penurunan sebesar Rp.252.918.407,- atau sebesar

11,48 persen dari realisasi tahun lalu pada periode yang sama. Penurunan tersebut disebabkan karena tidak adanya anggaran untuk belanja modal pada tahun ini.

Perbandingan realisasi belanja TA 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Perbandingan Realisasi Belanja per 30 September TA 2023 dan TA 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik (Turun)	
			Rp	%
Belanja Pegawai	1.429.049.568	1.572.289.565	(143.239.997)	(9,11)
Belanja Barang	521.534.340	621.212.750	(99.678.410)	(16,05)
Belanja Modal	0	10.000.000	(10.000.000)	(100,00)
Total Belanja	1.950.583.908	2.203.502.315	(252.918.407)	(11,48)

B.2.1. Belanja Pegawai

Realisasi
Belanja
Pegawai :
Rp
1,429.049
.568

Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Agama Negara per 30 September TA 2023 dan TA 2022 adalah sebesar Rp. 1.429.049.568 ,- dan Rp. 1.572.289.565,-.

Realisasi Belanja Pegawai TIII TA 2023 mengalami penurunan sebesar 9,11 persen dibandingkan Realisasi Belanja Pegawai TIII TA 2022. Hal ini disebabkan adanya mutasi hakim di tahun 2023.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Perbandingan Belanja Pegawai per 30 September TA 2023 dan TA 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik(Turun)	%
Beban Gaji Pokok PNS	610.471.000	640.058.640	(29.587.640)	(4,62)
Beban Pembulatan Gaji PNS	9.781	10.605	(824)	(7,77)
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	45.263.884	47.591.296	(2.327.412)	(4,89)
Beban Tunj. Anak PNS	14.270.036	15.109.528	(839.492)	(5,56)
Beban Tunj. Struktural PNS	14.270.000	19.660.000	(5.390.000)	(27,42)
Beban Tunj. Fungsional PNS	512.585.000	589.935.000	(77.350.000)	(13,11)
Beban Tunj. PPh PNS	59.225.489	70.336.485	(11.110.996)	(15,80)
Beban Tunj. Beras PNS	38.386.590	39.936.150	(1.549.560)	(3,88)
Beban Uang Makan PNS	86.223.000	93.422.000	(7.199.000)	(7,71)
Beban Tunjangan Umum PNS	8.030.000	7.630.000	400.000	5,24
Beban Tunjangan Kemahalan Hakim	40.500.000	48.600.000	(8.100.000)	(16,67)
Beban Uang Lembur	0	0	0	0)
Total Belanja Brutto	1.429.234.780	1.572.289.704	(143.054.924)	(9,10)
Pengembalian Belanja	(185.212)	(139)	(185.073)	133.146,04
Total Belanja Netto	1.429.049.568	1.572.289.565	(143.239.997)	(9,11)

B.2.2. Belanja Barang

Realisasi
Belanja
Barang :
Rp3521.534
.340,-

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Agama Negara per 30 September TA 2023 dan TA 2022 adalah sebesar Rp. 521.534.340,- dan Rp. 621.212.750,-.

Realisasi Belanja Barang TA 2023 mengalami penurunan sebesar 16,05 persen dibandingkan Realisasi Belanja Barang TA 2022. Hal ini disebabkan antara lain: antara belum selesainya realisasi pelaksanaan belanja pemeliharaan Gedung dan bangunan di Pengadilan Agama Negara.

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

Perbandingan Belanja Barang per 30 September TA 2023 dan TA 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Perubahan	
	Realisasi	Realisasi	Rp	%
Belanja Barang Operasional	291.886.578	290.354.078	1.532.500	0,53
Belanja Barang Non Operasional	6.624.000	2.530.000	4.094.000	161,82
Belanja Barang Persediaan	22.429.000	28.789.000	(6.360.000)	(22,09)
Belanja Jasa	35.378.360	79.309.046	(43.930.686)	(55,39)
Belanja Pemeliharaan	129.623.501	171.646.078	(42.022.577)	(24,48)
Belanja Perjalanan Dinas	35.592.901	48.584.548	(12.991.647)	(26,74)
Total Belanja Brutto	521.534.340	621.212.750	(99.678.410)	(16,05)
Pengembalian Belanja	0	0	0	0,00
Total Belanja Netto	521.534.340	621.212.750	(99.678.410)	(16,05)

D

B.2.3. Belanja Modal

Realisasi
Belanja
Modal
:Rp0,-

Realisasi Belanja Modal Pengadilan Agama Negara per 30 September TA 2023 dan TA 2022 adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 10.000.000,-.

Realisasi Belanja Modal TA 2023 mengalami penurunan sebesar 100 persen dibandingkan Realisasi Belanja Modal TA 2022. Hal ini disebabkan antara lain tidak adanya anggaran untuk belanja modal di tahun 2023 .

Rincian Belanja Modal dapat dilihat pada tabel di bawah :

Perbandingan Belanja Modal per 30 September TA 2023 dan TA 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Perubahan	
			Rp	%
Belanja Modal Peralatan & Mesin	0	10.000.000	(10.000.000)	(100,00)
Total Belanja Brutto	0	10.000.000	(10.000.000)	(100,00)
Pengembalian Belanja	0	0	0	0,00
Total Belanja Netto	0	10.000.000	(10.000.000)	(100,00)

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

C.1. Aset Lancar

*Aset Lancar: Rp
24.000.000,-*

Nilai Aset Lancar per 30 September 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.24.000.000,- dan Rp. 0,-.

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Pengadilan Agama Negara per 30 September 2023 dan 2022 disajikan pada tabel di bawah:

Rincian Aset Lancar per 30 September 2023 dan 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022
Kas di Bendahara Pengeluaran	24.000.000	0
Belanja Dibayar di Muka (prepaid)	0	0
Persediaan	0	0
Total Aset Lancar	24.000.000	0

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

*Kas di
Bendahara
Pengeluaran:
Rp 24.000.000*

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 September 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 24.000.000 dan Rp. 0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam tabel di bawah :

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 September 2023 dan 2022
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	TA 2023	TA 2022
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	24.000.000	0
	Jumlah	24.000.000	0

C.1.2. Belanja Dibayar di Muka

*Belanja
Dibayar di
Muka: Rp0,-*

Belanja Dibayar di Muka per 30 September 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari telah dibayarkannya secara penuh belanja dan membebani anggaran tahun anggaran berjalan namun barang atau jasa belum diterima.

Rincian Belanja Dibayar di Muka per 30 September 2023 dan 2022
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	TA 2023	TA 2022
1	Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	0	0
Jumlah		0	0

C.1.3. Persediaan

*Persediaan:
Rp0,-*

Persediaan per 30 September 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 30 September 2023 dan 30 September 2022 adalah sebagai berikut:

Persediaan per 30 September TA 2023 dan 30 September 2022

No.	Uraian	2023	2022
1	Barang Konsumsi	0	0
2	Amunisi	0	0
3	Bahan Untuk Pemeliharaan	0	0
4	Suku Cadang	0	0
5	Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0
6	Aset Tetap atau Persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	0	0
7	Bahan Baku	0	0
8	Barang dalam Proses	0	0

9	Persediaan untuk Tujuan Strategis	0	0
10	Persediaan Barang Hasil Sitaan	0	0
11	Persediaan lainnya	0	0
Total		0	0

C.2. Aset Tetap

*Aset Tetap : Rp
3.400.330.068,-*

Nilai Aset Tetap per 30 September 2023 dan 2022 tersaji sebesar Rp. 3.400.330.068,- dan Rp. 3.492.829.442,-. Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap per 30 September 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :

Rincian Aset Tetap per 30 September 2023 dan 2022			
<i>(dalam satuan Rupiah)</i>			
No.	Uraian	TA 2023	TA 2022
1	Tanah	1.604.226.000	1.604.226.000
2	Peralatan dan Mesin	2.615.348.076	2.508.280.576
3	Gedung dan Bangunan	1.444.657.000	1.444.657.000
4	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	0	74.717.500
5	Aset Tetap Lainnya	30.871.557	30.871.557
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0
Jumlah		5.695.102.633	5.662.752.633

C.2.1. Tanah

*Tanah:
Rp1.604.226.000,-*

Nilai Aset Tetap berupa Tanah per 30 September 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 1.604.226.000,- dan Rp. 1.604.226.000,-.

Rincian saldo tanah per tanggal 30 September 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Saldo Tanah per 30 September 2023 dan 2022

No.	KIB	Luas (m ²)	No. Sertifikat	Atas Nama	Peruntukan	Jumlah
1	1	7.534		Jl. Negara Kandangan	Kantor	1.604.226.000
Jumlah						1.604.226.000

C.2.2. Peralatan dan Mesin

*Peralatan dan
Mesin : Rp
2.615.348.076,-*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 30 September 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 2.615.348.076,- dan Rp. 2.508.280.576,-.

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2022	2.508.280.576
Mutasi Tambah	107.067.500
Mutasi Kurang	
Saldo per 30 September 2023	2.615.348.076
Akumulasi Penyusutan s.d 30 September 2023	(2.061.456.999)
Nilai Buku 30 September 2023	553.891.077

Realisasi belanja dalam rangka perolehan aset peralatan dan mesin pada Triwulan III Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 0,-. Sedangkan perolehan Peralatan dan Mesin dari pembelian adalah sebesar Rp. 0,-.

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.3. Gedung dan Bangunan

*Gedung dan
Bangunan : Rp
1.444.657.000,-*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 30 September 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 1.444.657.000,- dan Rp. 1.444.657.000,-.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2022	1.444.657.000
Mutasi Tambah	
Mutasi Kurang	

Saldo per 30 September 2023	1.444.657.000
Akumulasi Penyusutan s.d 30 September 2023	(233.315.566)
Nilai Buku 30 September 2023	1.211.341.434

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.4. Jalan , Irigasi, dan Jaringan

*Aset Jalan ,
Irigasi, dan
Jaringan : Rp 0*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 September 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 74.717.500.

Mutasi nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2022	74.717.500
Mutasi Tambah	
Mutasi Kurang	74.717.500
Saldo per 30 September 2023	0
Akumulasi Penyusutan s.d 30 September 2023	0
Nilai Buku 30 September 2023	0

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap
Lainnya: Rp
30.871.557*

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 30 September 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 30.871.557 dan Rp. 30.871.557.

Mutasi tambah aset tetap lainnya pada Triwulan III Tahun 2023 keseluruhannya berasal dari Buku Rp. 0,-.

Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2022	30,871,557
----------------------------	------------

Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	0
Saldo per 30 September 2023	30,871,557
Akumulasi Penyusutan s.d 30 September 2023	0
Nilai Buku 30 September 2023	30,871,557

Nilai dan perhitungan penyusutan dan akumulasinya disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.6. Konstruksi dalam Pengerjaan

*Konstruksi dalam
Pengerjaan : Rp
0*

Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 30 September 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

*Akumulasi
Penyusutan Aset
tetap : Rp
(2.294.772.565,-)*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 September 2023 dan 2022 adalah masing-masing Rp(2.294.772.565) dan Rp(2.169.923.191).

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 30 September 2023 disajikan pada tabel di bawah, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 September 2023
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	2.615.348.076	(2.061.456.999)	553.891.077
2	Gedung dan Bangunan	1.444.657.000	(233.315.566)	1.211.341.434
3	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
4	Aset Tetap Lainnya	30.871.557	0	30.871.557
	Jumlah	4.090.876.633	(2.294.772.565)	1.796.104.068

C.3. Aset Lainnya

*Aset Lainnya:
Rp 0,-*

Nilai Perolehan Aset Lainnya per 30 September 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan, baik ke dalam aset lancar maupun aset tetap.

Rincian Aset Lainnya per 30 September 2023 (dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2023	TA 2022
1	Aset tak Berwujud	14.450.000	14.450.000
2	Aset Lain-lain	0	0
	Nilai perolehan Aset Lainnya	14.450.000	14.450.000
	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(14.450.000)	(14.450.000)
	Nilai buku Aset Lainnya	0	0

C.4.1. Aset tak berwujud

*Aset tak
Berwujud :
Rp 14.450.000,-*

Saldo aset tak berwujud (ATB) per 30 September 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 14.450.000 dan Rp. 14.450.000. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik.

Adapun rincian ATB per 30 September 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Aset tak Berwujud per 30 September 2023 (dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Nilai
1	Software	14.450.000
	Jumlah Total	14.450.000

Aset Tak Berwujud pada Pengadilan Agama Negara berupa software yang digunakan untuk menunjang operasional kantor.

Mutasi aset tak berwujud dapat dilihat pada tabel di bawah :

Saldo per 31 Desember 2022	14.450.000
Mutasi Tambah	
Mutasi Kurang	0
Saldo per 30 September 2023	14.450.000

C.4.2. Aset Lain-lain

*Aset Lain-lain :
Rp 0,-*

Saldo aset lain-lain per 30 September 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Aset Lain-lain merupakan barang milik negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Pengadilan Agama Negara serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Mutasi aset lain-lain dapat dilihat pada tabel di bawah :

Saldo per 31 Desember 2022	0
Mutasi Tambah	
Mutasi Kurang	
Saldo per 30 September 2023	0

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

*Kewajiban
Jangka Pendek :
Rp159.815.542,-*

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 30 September 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 159.815.542,- dan Rp. 0. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada Pengadilan Agama Negara per 30 September 2023 disajikan pada tabel di bawah :

Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 30 September 2023 dan 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022
Uang Muka Dari KPPN	24.000.000	0
Utang Kepada Pihak Ketiga	135.815.542	0
Jumlah	159.815.542	0

C.5.1. Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga: Rp135.815.542,-

Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 30 September 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 135.815.542,- dan Rp. 0,-. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Adapun rincian Utang Pihak Ketiga Pengadilan Agama Negara per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga per 30 September 2023

No.	Uraian	Jumlah	Penjelasan
1	Belanja Pegawai Yang Masih Harus di Bayar	122.519.542	-
2	Belanja Barang Yang Masih Harus di Bayar (Rekening Listrik)	13.296.000	-
3.	Belanja Barang Yang Masih Harus di Bayar (Rekening Air)	-	-
4.	Belanja Barang Yang Masih Harus di Bayar (Rekening Telepon)	-	-
5.	Belanja Barang Yang Masih Harus di Bayar (Rekening Internet)	-	-
	Jumlah	135.815.542	-

C.5.2. Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN: Rp 24.000.000

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 September 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 24.000.000 dan Rp. 0. Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP)

atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

C.6. Ekuitas

*Cadangan
Piutang:
Rp
3.264.514.526,-*

Ekuitas per 30 September 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp3.264.514.526,- dan Rp3.492.829.442,-. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Per tanggal 30 September 2023 terdapat penurunan nilai Kewajiban sebesar Rp. 228.314.916,- (6,54%) dari nilai per 30 September TA 2022.

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

*Pendapatan
PNbp : Rp0,-*

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp0,- dan Rp 0,-. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Estimasi dan Realisasi PNBp per 30 September TA 2023
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	618.000	0	0
2.	Pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin	0	0	0
3.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0,00
Total Pendapatan		618.000	0	0

D.2. Beban Pegawai

*Beban Pegawai
: Rp
1.551.569.110,-*

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.551.569.110,- dan Rp1.705.736.328,-. Beban Pegawai

adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Rincian Beban Pegawai per 30 September TA 2023 dan TA 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik(Turun)	%
Beban Gaji Pokok PNS	667.401.700	697.303.600	(29.901.900)	(4,29)
Beban Pembulatan Gaji PNS	10.296	11.346	(1.050)	(9,25)
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	49.806.514	51.636.840	(1.830.326)	(3,54)
Beban Tunj. Anak PNS	15.590.894	16.378.680	(787.786)	(4,81)
Beban Tunj. Struktural PNS	15.790.000	21.180.000	(5.390.000)	(25,45)
Beban Tunj. Fungsional PNS	557.820.000	644.270.000	(86.450.000)	(13,42)
Beban Tunj. PPh PNS	63.779.176	75.659.822	(11.880.646)	(15,70)
Beban Tunj. Beras PNS	42.022.530	43.514.040	(1.491.510)	(3,43)
Beban Uang Makan PNS	86.223.000	93.422.000	(7.199.000)	(7,71)
Beban Tunjangan Umum PNS	8.575.000	8.360.000	215.000	2,57
Beban Tunjangan Kemahalan Hakim	44.550.000	54.000.000	(9.450.000)	(17,50)
Beban Uang Lembur	0	0	0	0,00
Total Beban Pegawai	1.551.569.110	1.705.736.328	(154.167.218)	(9,04)

D.3. Beban Persediaan

Beban
Persediaan :
Rp22.429.000,-

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp22.429.000,- dan 28.889.000,- Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 dan 2022 adalah sebagai

berikut:

Rincian Beban Persediaan per 30 September TA 2023 dan TA 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik(Turun)	%
Beban Persediaan Konsumsi	22.429.000	28.889.000	(6.460.000)	(22,36)
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	0	0	0	0,00
Beban Persediaan Amunisi	0	0	0	0,00
Beban Persediaan Pita Cukai, Materai, dan Leges	0	0	0	0,00
Beban Persediaan Lainnya	0	0	0	0,00
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0	0	0	0,00
Total Beban Persediaan	22.429.000	28.889.000	(6.460.000)	(22,36)

D.4. Beban Barang dan Jasa

Beban Jasa :
Rp347.184.938

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp347.184.938,- dan Rp380.363.868,-. Beban Barang adalah konsumsi barang dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas dan Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa per 30 September TA 2023 dan TA 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik(Turun)	%
Beban Keperluan Perkantoran	273.892.578	267.429.580	6.462.998	2,42
Beban Jasa Pos dan Giro	388.000	1.340.000	(952.000)	(71,04)
Beban Honor Operasional Satker	29.192.000	28.400.000	792.000	2,79
Beban Barang Operasional Lainnya	1.710.000	4.630.000	(2.920.000)	(63,07)
Beban Bahan	0	0	0	0,00
Beban Barang Non Opr. Lainnya	6.624.000	2.530.000	4.094.000	161,82
Beban Langganan Listrik	0	29.361.480	(29.361.480)	(100,00)
Beban Langganan Telepon	677.360	703.008	(25.648)	(3,65)
Beban Langganan Air	3.111.000	2.359.800	751.200	31,83
Belanja Sewa	31.590.000	38.610.000	(7.020.000)	(18,18)
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	0	5.000.000	(5.000.000)	(100,00)
Total Beban Barang dan Jasa	347.184.938	380.363.868	(33.178.930)	(8,72)

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan:
Rp129.623.501,-

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp129.623.501,- dan Rp172.166.078,-. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan per 30 September TA 2023 dan TA 2022 (dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik(Turun)	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	47.824.000	83.077.600	(35.253.600)	(42,43)
Bangunan Lainnya	5.750.000	4.782.000	968.000	20,24
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	76.049.501	84.306.478	(8.256.977)	(9,79)
Beban Pemeliharaan Jaringan	0	0	0	0,00
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	0	0	0	0,00
Total Beban Pemeliharaan	129.623.501	172.166.078	(42.542.577)	(24,71)

D.6. Beban Perjalanan Dinas

*Beban
Perjalanan
Dinas :
Rp35.592.901,-*

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp35.592.901,- dan Rp48.584.548,-. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas per 30 September TA 2023 dan TA 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik(Turun)	%
Beban Perjalanan Biasa	35.592.901	48.584.548	(12.991.647)	(26,74)
Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	0	0	0	0,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota	0	0	0	0,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting luar Kota	0	0	0	0,00
Total Beban Perjalanan Dinas	35.592.901	48.584.548	(12.991.647)	(26,74)

D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

*Beban Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat :
Rp0*

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2015. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

per 30 September TA 2023 dan TA 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik(Turun)	%
Beban Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Total Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0	0

D.8. Beban Bantuan Sosial

*Beban Bantuan
Sosial : Rp0*

Beban Bantuan Sosial Tahun Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Bantuan Sosial
per 30 September TA 2023 dan TA 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik(Turun)	%
Beban Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial	0	0	0	0
Beban Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial	0	0	0	0
Beban Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial	0	0	0	0
Total Beban Bantuan Sosial	0	0	0	0

D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

*Beban
Penyusutan dan
Amortisasi :
120.805.624,-*

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp120.805.624,- dan Rp77.267.595,-. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan

manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 30 September TA 2023 dan TA 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik(Turun)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	99.595.117	56.057.088	43.538.029	77,67
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	21.210.507	21.210.507	0	0,00
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	0	0,00
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0,00
Jumlah Penyusutan	120.805.624	77.267.595	43.538.029	56,35
Beban Amortisasi Aset tak Berwujud	0	0	0	0,00
Beban Penyusutan Aset lain-lain	0	0	0	0,00
Jumlah Amortisasi	0	0	0	0,00
Total Beban Penyusutan dan Amortisasi	120.805.624	77.267.595	43.538.029	56,35

D.10. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih : Rp0

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Piutang tak Tertagih
per 30 September TA 2023 dan TA 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik(Turun)	%
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek	0	0	0	0

Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang	0	0	0	0
Total Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih	0	0	0	0

D.11. Beban Lain-lain

Beban Lain-Lain : Rp0

Jumlah Beban Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Lain-lain
30 September TA 2023 dan TA 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik(Turun)	%
Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
Beban Aset Ekstrakomptabel Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Beban Aset Ekstrakomptabel Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0
Total Beban Lain-lain	0	0	0	0

D.12. Kegiatan Non Operasional

Beban Kegiatan Non Operasional : Rp0,-

Pos Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional
per 30 September TA 2023 dan TA 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik(Turun)	%
KEGIATAN NON OPERASIONAL				
Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0	4.213.400	(4.213.400)	(100)
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	0
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	0
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	0
Jumlah Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	0
Total Surplus(defisit) dari kegiatan Non Operasional	0	4.213.400	(4.213.400)	(100)

D.13. Pos Luar Biasa

Beban Pos Luar Biasa : Rp0,-

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Pos Luar Biasa
per 30 September TA 2023 dan TA 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik(Turun)	%
Pendapatan PNPB	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas	0	0	0	0
Beban Persediaan	0	0	0	0
Total Pos Luar Biasa	0	0	0	0

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 30 September 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp3.492.829.442,- dan Rp3.144.118.347,-.

E.2. Surplus (defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp(2.207.205.074) dan Rp(2.408.794.017). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. 1. Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan akhir

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Koreksi Nilai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 49 Rincian Koreksi Nilai Persediaan
per 30 September TA 2023
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	Koreksi
Barang Konsumsi	0
Suku Cadang	0
Barang Persediaan Lainnya	0
Total Koreksi Nilai Persediaan	0

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

- Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0,-.

E.3.4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

- Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0,-. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap non revaluasi Rp0 dan koreksi nilai aset lainnya non revaluasi Rp0 .

E.3.5 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0,-. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari :

**Tabel 50 Rincian Koreksi Lain-lain
per 30 September TA 2023
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	Koreksi
Koreksi beban	0
Koreksi Pendapatan	0
Koreksi Piutang	0
Koreksi Kewajiban	0
Koreksi hibah	0
Jumlah	0

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.978.890.158,- dan Rp2.404.793.665,-.

Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Tabel 51 Rincian Nilai Transaksi antar Entitas

per 30 September TA 2023
(dalam satuan Rupiah)

Transaksi antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	0
Ditagihkan ke Entitas Lain	1.950.583.908
Transfer Masuk	28.306.250
Transfer Keluar	0
Pengesahan Hibah Langsung	0
Pengesahan Pengembalian hibah Langsung	0
Jumlah	1.978.890.158

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 September 2023, DDEL sebesar Rp0 sedangkan DKEL sebesar Rp1.950.583.908,-.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk sampai tanggal 30 September 2023 adalah sebesar 28.306.250. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 September 2023, sebesar Rp0-.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 September 2023, adalah Rp0.

Rincian Transfer Masuk untuk Triwulan III tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No	Pemberi Transfer Masuk	Bentuk Transfer Masuk	Nilai
1	Mahkamah Agung RI	Peralatan dan Mesin	28.306.250

Rincian Penerimaan Hibah Langsung Tahun 2023 disajikan pada lampiran

E.3. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp3.264.514.526,- dan Rp3.140.117.995,-.

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Tidak ada Temuan dan Tidak lanjut Temuan BPK untuk Triwulan III Tahun Anggaran ini dan Tahun Anggaran sebelumnya.

F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual

Terdapat informasi pendapatan dan belanja secara akrual untuk Triwulan III ini (terlampir)

F.2.3. Rekening Pemerintah

A.n. BPG 110 PA (01) NEGARA yang digunakan sebagai Penampung DIPA BUA dengan saldo akhir per tanggal 30 September 2023 sebesar Rp0,-.

F.2.4. Revisi DIPA

Terdapat revisi DIPA 3 kali untuk Triwulan III ini.

1. Revisi pertama pada tanggal 6 April 2023;
2. Revisi kedua pada tanggal 14 Juli 2023;

F.2.5. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Tidak terdapat Ralat SPM untuk semester ini.

F.2.6. Catatan Penting Lainnya

Berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Negara Nomor: Nomor : W15-A11/568/KU.00.1/2/2023 tanggal 16 Februari 2023 Tentang Perubahan

atas Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Negara W15-A11/142 /KU.00.1/1/2023 tanggal 2 Januari 2023 Tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang diberi Kewenangan untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Penanggung Jawab Kegiatan/ Pembuat komitmen, Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk menguji Tagihan Kepada Negara dan Menandatangani SPM, dan Bendahara Pengeluaran pada Pengadilan Agama Negara maka pada tanggal 16 Februari 2023 telah dilakukan penggantian Pejabat Pengelola Keuangan, Semula:

Pejabat Pembuat Komitmen	: H. Abdul Khaliq, S.Ag
Pejabat Penandatangan/Penguji SPM	: Nor Hendra Riyadi, S.H
Bendahara Pengeluaran	: Moh. Ramli, S.H.I
Menjadi :	
Pejabat Pembuat Komitmen	: Akhmad Muzakkir, S.H.I.
Pejabat Penandatangan/Penguji SPM	: Rahmadi, S.AP
Bendahara Pengeluaran	: Alfi Syahrin Taufiq, A.Md.

DAFTAR DAN LAMPIRAN

*A. RINCIAN NILAI PEROLEHAN,
AKUMULASI PENYUSUTAN,
AMORTISASI DAN NILAI BUKU
ASET TETAP*

Pengadilan Agama Negara
Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, Amortisasi dan Nilai Buku Aset Tetap
untuk Periode yang Berakhir pada 30 September 2023

No.	Aset Tetap	Masa Manfaat	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Beban Penyusutan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
				Per 30 September 2023	2023	Per 30 September 2023	Per 30 September 2023
A.	Peralatan dan Mesin	385	2.615.348.076	(2.061.456.999)	(178.356.367)	(2.061.456.999)	553.891.077
1.	Alat bantu	2	283.961.720	(113.465.720)	(14.208.000)	(113.465.720)	170.496.000
2.	Alat Angkutan Darat Bermotor	6	232.887.446	(232.887.466)	0	(232.887.466)	0
3.	Alat Bengkel Tak Bermesin	1	3.300.000	(660.000)	(330.000)	(660.000)	2.640.000
4.	Alat Kantor	50	116.776.000	(116.776.000)	0	(116.776.000)	0
5.	Alat Rumah Tangga	181	608.786.690	(506.843.394)	(14.617.162)	(506.843.394)	101.943.296
6.	Alat Studio	18	91.933.820	(37.201.164)	(7.601.782)	(37.201.164)	54.732.656
7.	Alat Komunikasi	12	16.243.000	(16.243.000)	0	(16.243.000)	0
8.	Peralatan Pemancar	3	148.994.700	(101.746.555)	(6.749.735)	(101.746.555)	47.248.145
9.	Komputer Unit	75	884.047.430	(730.003.950)	(109.962.615)	(730.003.950)	154.043.480
10.	Peralatan Komputer	37	228.417.250	(205.629.750)	(24.887.073)	(205.629.750)	22.787.500
B.	Gedung dan Bangunan	8	1.444.657.000	(233.315.566)	(21.210.507)	(233.315.566)	1.211.341.434
1.	Bangunan Gedung Tempat Kerja	7	1.316.539.000	(215.476.349)	(19.588.760)	(215.476.349)	1.101.062.651
2.	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	1	128.118.000	(17.839.217)	(1.621.747)	(17.839.217)	110.278.783
C.	Jaringan	0	0	0	74.717.500	0	0
1.	Instalasi Lain	0	0	0	74.717.500	0	0
JD.	Aset Tetap Lainnya	53	30.871.557	0	0	0	30.871.557
1.	Bahan Perpustakaan Tercetak	51	30.433.557	0	0	0	30.433.557
2.	Kartografi, Naskah dan Lukisan	2	438.000	0	0	0	438.000
	TOTAL		5.695.102.633	(2.294.772.565)	(124.849.374)	(2.294.772.565)	3.400.330.068

B. Daftar Hibah Langsung

Pengadilan Agama Negara

Daftar Hibah Langsung berupa Uang/Barang/Jasa untuk Periode yang Berakhir pada 30 September 2023

No.	Nama Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Sumber Dana	Nilai Hibah	Sudah Disahkan	Belum Disahkan	
						Nilai	Keterangan
-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah :				-	-	-	-

B. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual

PENGADILAN AGAMA NEGARA
INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA SECARA AKRUAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2023

BA	: 005	MAHKAMAH AGUNG			
Eselon 1	: 01	BADAN URUSAN ADMINISTRASI			
UAPPA W	: 1500	PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN			
Satuan Ker	: 402571	PENGADILAN AGAMA NEGARA			

No	Belanja		Realisasi Menurut Basis Kas	Penyesuaian Akrual		Informasi Akrual	Dokumen Sumber
	Kode Akun	Uraian		Tambah	Kurang		
1	2	3	4	5	6	7	8

NIHIL

Kuasa Pengguna Anggaran



 Sekretaris



 Akhmad Muzakir, S.H.I.

 NIP.198011172007041001

DRAFT